

HUBUNGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN POLITIK KEKUASAAN DI INDONESIA

Ana Cahayani Fatimah
STIT Sunan Giri Bima NTB
anacahayani@gmail.com

Submit	Received	Edited	Published
16 Juni	16 Juni	27 Juni	29 Juni
DOI	10.47625/fitrah.v13i1.352		

ABSTRACT

Implementation of an effective, efficient and targeted Islamic education process requires the linkage of several elements such as: adequate educational resources, institutions that play an active role in accommodating, direct and indirect support from government institutions and policies because achieving educational goals requires optimal support from the community. various aspects so that the education process can be carried out in accordance with the objectives of the National Education System Law No. 20 of 2003 article 12 paragraph (1) letter a. Although the emergence of Islamic education actually did not come from power, but from religious teachings which were then judged to be good so that they were applied and became the philosophy of the state. Still, Islamic education is in the grip of power. As in establishing a boarding school or institution, it is required to ask permission from the power. Thus, Islamic education and power cannot be separated because there is an interaction that requires and depends on each other

ABSTRAK

Implementasi proses pendidikan Agama Islam yang efektif, efisien dan tepat sasaran memerlukan keterkaitan beberapa unsur seperti: sumber daya pendidik yang memadai, institusi yang berperan aktif mewadahi, dukungan lembaga dan kebijakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung karna ketercapaian tujuan pendidikan memerlukan dukungan secara optimal dari berbagai aspek sehingga proses pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 12 ayat (1) huruf a. Meskipun munculnya pendidikan Islam sebenarnya tidak berasal dari kekuasaan, melainkan dari ajaran agama yang kemudian dinilai baik sehingga diterapkan dan menjadi falsafah kenegaraan. Tetap saja pendidikan Islam berada dalam cengkraman kekuasaan. Seperti dalam mendirikan sebuah lembaga pesantren atau institusi diharuskan meminta izin kepada kekuasaan. Dengan demikian, pendidikan Islam dan kekuasaan tidak dapat terpisahkan sebab terjadi interaksi yang saling membutuhkan dan saling menggantungkan satusama lain

Kata Kunci: *Hubungan, Pendidikan Agama Islam, Politik Kekuasaan*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, sebab dengan adanya proses pendidikan manusia dapat meraih hakikat insaninya. Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Sedangkan menurut Kihajar dewantara Pendidikan yaitu: tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak., menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.²

Selaras dengan pengertian di atas, Anas Salahudin mendefinisikan pendidikan dengan proses mendidik, membina, mengandalkan, mengawasi, mempengaruhi dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan, meningkatkan pengetahuan dan membentuk kepribadian yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang bekerja secara interaktif dengan peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang yang terlibat dalam pendidikan.³

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwa proses pendidikan memerlukan semua orang termasuk institusi, lembaga dan pemerintahan yang berkaitan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung secara optimal proses pendidikan sehingga tujuan dan hakikat pendidikan dapat tercapai dengan lebih maksimal.

Dewasa ini, proses pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya mis-education antara pendidik dan peserta didik. Hal tersebut sangat terlihat ketika terjadi penurunan kualitas pencapaian dalam pendidikan seperti tingkahlaku peserta didik yang tidak mencerminkan budi pekerti yang baik, bahkan tidak jarang berita-berita terkait tindak kekerasan peserta didik terhadap pendidik atau sebaliknya. Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan 2 (SMK 2) Makassar, seorang guru dipukul orang tua murid karena menegur anaknya yang bermain ponsel saat jam pelajaran.⁴

¹ Dinas Pendidikan, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2005), hlm. 3.

² Kihajar dewantara, *Bagian I: Pendidikan cetakan kedua*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), hlm. 20.

³ Anas Salahudin, *Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 22.

⁴ <https://youtu.be/SeMDQHfESW8>. Diakses Pada Tanggal 19/03/2022 pukul 09.02 WITA.

Kejadian tersebut di atas mewakili beberapa tindak kekerasan yang menyelubungi pendidikan di Indonesia yang seharusnya tidak lantas dihukumi sebagai bentuk kegagalan yang dilakukan oleh satu pihak tertentu, melainkan seluruh pihak yang berkaitan dengan proses pendidikan. Dalam hal ini pendidik dan sistem pendidikan menjadi sorotan utama karena pendidik merupakan oknum yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan, sedangkan sistem pendidikan merupakan cara atau metode yang diterapkan dan ditempuh oleh pendidik dalam menjalankan proses pendidikan. Sistem pendidikan sendiri adalah produk atau kebijakan dari pemerintah, jika boleh dikatakan pemerintah adalah oknum yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap sistem pendidikan. Pemerintah sendiri memiliki sumber kekuasaan dimana pemerintah berhak untuk mengatur kehidupan masyarakat guna menerapkan nilai-nilai kependidikan. Kekuasaan tersebut bersifat mengikat dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari pemegang kekuasaan.

Secara historis, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan yang begitu panjang dari zaman kerajaan, penjajahan, era kemerdekaan, dan pasca reformasi. Pada masa Portugis dan Spanyol mereka menyerbu Indonesia dengan dibarengi oleh misionaris yang diberi tugas untuk menyebarkan agama Nasrani di kalangan penduduk Indonesia. Salah satunya adalah Franciscus Xaverius yang dianggap sebagai pelopor pertama dari agama katolik di Indonesia yang hingga saat ini namanya masih melekat terutama pada institusi atau lembaga pendidikan katolik di Indonesia. Maka pada tahun 1536 Masehi, didirikanlah sekolah agama bagi anak-anak Ternate yang di dalamnya mempelajari tentang agama Nasrani, membaca, menulis dan berhitung.⁵

Pada zaman kolonial Belanda, tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang diadakan pada zaman Portugis dan Spanyol. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda memiliki tujuan politik tersendiri yaitu untuk menciptakan buruh tenaga kerja dengan upah rendah sehingga bisa membantu Belanda dalam memperluas daerah jajahannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Ahmad Mansyur Surya Negara dalam bukunya *Api Sejarah*. Mansyur menambahkan bahwa pada tahun 1830-1919 M merupakan tahun terjadinya kegiatan yang sangat menyengsarakan masyarakat pribumi terutama yang beragama Islam adanya kerja paksa (Daendels 1808 M) dan pengumpulan pajak (Raffles 1811-1816 M). Perbedaan agama, ras, suku, dan strata sosial terlihat nyata ketika sistem pendidikan kolonial Belanda diterapkan.⁶

⁵ Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV Ilmu, 1959), hlm. 114-115)

⁶ Ahmad Mansyur Surya Negara, *Api Sejarah*, (Bandung: CV Tria Pratama, 2016), hlm.308-309.

Seiring berjalanya waktu, perhulatan pendidikan juga ikut mengalami perubahan yang sangat berarti terutama saat adanya proklamasi yang menandai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan menjadi gampang diperoleh bagi rakyat pribumi terutama bagi yang memeluk agama Islam. Hal tersebut dirasakan saat pendidikan tumbuh dan berkembang dari dalam rakyat itu sendiri melalui pesantren-pesantren yang diampu oleh para tokoh dan ulama. Sistem yang diterapkan dalam pesantren berbanding terbalik dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh kolonial Belanda atau bahkan Portugis. Perbedaan ras, suku, tidak menjadikan halangan untuk memperoleh pendidikan yang memadai terutama pendidikan yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. Meskipun, pendidikan di pasca kemerdekaan lebih bebas, masih saja ada kontroversi yang mendasar dan perlu untuk diadakan pemulihan bersifat step by step sehingga menghasilkan sistem yang benar-benar dapat mencapai hakikat pendidikan.

Dari sedikit paparan tentang perjalanan sistem pendidikan di Indonesia diatas, terlihat bagaimana pemerintah (kekuasaan) tidak dapat terpisah dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan. Seperti dalam ilmu Biologi, hubungan antar makhluk hidup yang dikenal dengan istilah simbiosis. Istilah simbiosis terbagi menjadi tiga, yaitu:

Mutualisme (saling menguntungkan antar pihak), parasitisme (memberi keuntungan sepihak dan merugikan terhadap pihaklain), komensalisme (memberi keuntungan satu pihak dan tidak merugikan pihak yang lain). Begitu juga hubungan yang terjadi antara sistem pendidikan(kekuasaan) dan pendidikan, hubungan tersebut dapat dikatakan tergolong mutualisme, komensalisme atau bahkan parasitisme. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai hubungan antara pendidikan islam dan politik kekuasaan. Selain itu, juga akan dibahas sedikit paparan yang berkaitan dengan urgensi pendidikan Islam dan posisi pendidikan Islam saat ini di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Achmadi dalam bukunya menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia yang sempurna sesuai dengan norma-norma Islam. Seperti yang telah diketahui bahwa fitrah manusia adalah kecenderungan untuk berbuat baik dan bertauhid berdasarkan pembawaan manusia.⁷ Oleh karena itu,

⁷ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanis Teoritis*, (Yogyakarta:Pustaka

pendidikan dalam islam juga harus mengarah pada tujuan diciptakanya manusia yaitu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wata'ala.

Sedangkan menurut prof Abuddin Nata, jika membahas tentang pengertian pendidikan islam maka setidaknya perlu mengembalikan kata pendidikan dari sumber asalnya yaitu kata Al Tarbiyah, al-Ta'lim, Al -Ta'dib dan Al-Tahzib yang menjadikan makna pendidikan tidak serta-merta diartikan sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Melainkan lebih dari itu, pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan disertai dengan akhlak yang menjadikan peserta didik memiliki nilai moral dalam hidupnya.⁸

Pola Pendidikan Islam Di Indonesia

Sejatinya pendidikan Islam telah ada sejak agama Islam tersebut masuk ke Indonesia. Banyak teori yang berpendapat tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Beberapa teori tersebut seperti teori Gujarat oleh Prof.Dr. C. Snouck Hurgronje, teori Makkah oleh Prof. Dr. Buya Hamka, teoriPersia oleh Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat, teori Cina oleh Prof. Dr.Slamet Muljana, teori Maritim oleh N.A. Baloch, dari semua teori tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, akan tetapi teori-teori tersebut mengerucut dalam satu kemungkinan, masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi dimana pola perdagangan jalur laut menjadi alasan terkuat masuknya Islam ke Indonesia.⁹

Menurut Martin, Setelah masuknya ajaran Islam ke Indonesia, barulah muncul perkembangan pendidikan dengan melaksanakan kajian-kajian diberbagai majlis seperti tempat perkumpulan warga dan masjid. Selain itu, juga mulai muncul sentral pendidikan yang mengharuskan peserta didiknya mukim disuatu tempat agar lebih optimal dalam menimba ilmu dari gurunya,maka mulailah pada abad ke-16 muncul pesantren-pesantren yang berfungsi sebagai pembelajaran kedua setelah masjid, Meskipun sebenarnya istilah pesantren sendiri belum dikenal waktu itu.¹⁰

Pesantren sendiri merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyebaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan pondok pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan fungsinya

Pelajar,2005), hlm. 31.

⁸ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016) hlm. 5-6.

⁹ Ahmad Mansyur Surya Negara, *Api Sejarah*,hlm. 101-105.

¹⁰ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* , (Yogyakarta: GadingPublishing, 2012), hlm. 98.

sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam sehingga dari pesantren lahir kader ulama, guru agama, muballigh, tokoh politik dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sejarah pendirian pesantren, awalnya didirikan dengan misi khusus, yaitu: Pertama, sebagai sarana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. Kedua, membentuk jiwa santri yang memiliki kemampuan moral dan religius. Ketiga, menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia.¹¹ Kemampuan pesantren untuk tetap bertahan hingga kini tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, terutama kalangan pesantren. Hal ini sangat beralasan, sebab ditengah derasnya arus modern dan globalisasi, dunia pesantren masih konsisten dengan kitab kuning dan konsep pendidikan yang mungkin oleh sebagian orang dianggap kuno. Begitu pula dengan pelajaran kitab-kitab klasik yang merupakan salah satu unsur dasar dari tradisi pesantren. Seluruh sisi kehidupan pesantren bersifat religius-teosentris yang merujuk kepada Alquran dan Hadis, sehingga semua aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada Tuhan.

Selain pesantren, ada juga sekolah islam yang bermula muncul dari adanya sekelompok masyarakat yang berlatar belakang agama yang mempunyai ide membuka sekolah dengan sistem "Sekolah Belanda" dengan tambahan pelajaran Agama. Inisiator utama dalam modernisasi pendidikan islam adalah organisasi modernis Islam seperti: Muhammadiyah (KH. Ahmad Dahlan 1912 M), Al-Irsyad (1913 M), Mathla'ul Anwar (KH. Jasin dkk. 1916 M).¹²

Dalam perkembangannya, pendirian pendidikan Islam di atas menjadi inspirasi bagi sebagian besar organisasi pergerakan islam. Meskipun sebenarnya lembaga pendidikan islam lain telah ada sebelum Muhammadiyah, Al-Irsyad dan Mathla'ul Anwar mendirikanya. Organisasi besar lain yang turut andil menumbuh kembangkan pendidikan islam seperti: Persatuan Umat Islam (KH. Ahmad Halim 1917 M), Persatuan Islam (A. Hasan 1923 M), Nahdlotul Ulama' (KH. Hasyim Asy'ari 1926M), dan Al-Jam'iyatul Washliyah (para pelajar dan guru-guru Maktab Islamiyah Tapanuli 1930 M) dengan pola dan ciri khas masing-masing. Sekolah yang mereka dirikan merupakan sekolah formal dengan memasukkan pelajaran Agama dan menambahkan nama Islam di belakangnya sehingga menjadi SD Islam, SMP Islam, dan SMA Islam. Selain itu, ada yang menggunakan nama organisasi

¹¹ Ainur Rofiq Dawam dan Ahmad T a'arifin, *Manajemen Madrasah Bebas Pesantren*, (Jakarta Utara: Listafariska, 2005), hlm. 6.

¹² Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional [paradigma Baru]*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 70.

penyelenggara seperti SD Muhammadiyah, SMP Ma'arif NU, SMA Al-Irsyad. Ada pula yang menggunakan perlambang berbahasa Arab, misalnya SD Al-Bayyinah, SMP Al-Azhar. Belakangan ini muncul nama SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu) SMPIT (Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu) model full day school atau Boarding School.¹³

Selain daripada lembaga pendidikan yang disebut di atas, ada juga pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Islam baik swasta maupun negeri. Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, dimana Satiman Wirjosandjoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslim di Hindia Belanda yang terjajah itu. Bagi Indonesia, kebutuhan Pendidikan tinggi Islam sudah sangat urgen untuk mendidik tenaga ahli dalam bidang Ilmu agama Islam dan sebagai pusat pengembangan intelektual Islam. Keinginan tersebut berhasil diwujudkan di Minangkabau dengan didirikannya sekolah Tinggi oleh persatuan Guru-Guru Agama Islam (PGAI) di Padang yang diresmikan pada tanggal 9 Desember 1940.¹⁴

Kekuasaan Dan Pendidikan

Pengertian Politik Kekuasaan

Makna kata politik berarti pengetahuan mengenai ketata negaraan, atau segala urusan dan tindakan kebijaksanaan taktik dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, atau lebih jauh dapat di artikan sebagai ilmu untuk mendapatkan kekuasaan.¹⁵ Secara etimologi kekuasaan berasal dari kata "kuasa" yang berarti kemampuan, kesanggupan, untuk berbuat sesuatu atau kekuatan, kewenangan atas sesuatu untuk menentukan, mengurus, mewakili dan sebagainya. Sedangkan secara terminologi kekuasaan merupakan kewenangan seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan untuk mewakili, mengatur, memerintah, dan mempengaruhi sesuatu.¹⁶

Masalah kekuasaan sangat menarik terutama dalam masyarakat modern. Dalam kehidupan sehari-hari manusia diatur oleh berbagai macam jenis kekuasaan seperti militer, ekonomi, politik dan lain-lain. Diantara berbagai jenis kekuasaan tersebut, kekuasaan dalam bidang politik lebih mendapat perhatian khusus masyarakat. Padahal kekuasaan politik hanya bagian kecil dari apa yang disebut kekuasaan sosial.

Arif Rohman dalam bukunya menjelaskan bahwa negara itu memiliki kekuasaan

¹³ Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional* [paradigma Baru],... Hlm 71. Lihat juga, Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*,... hlm. 162-193.

¹⁴ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumberwidya, 1992), hlm. 117.

¹⁵ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 608)

¹⁶ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm. 293.

politik untuk memaksa masyarakatnya secara sah untuk mengatur dan memerintah. Disamping itu, kekuasaan politik membutuhkan sumber-sumber untuk mendukung kekuasaannya. Contoh sumber kekuasaan yang diperlukan berupa sarana paksaan adalah senjata, penjara, kerja paksa, teknologi, pendidikan, sistem mengikat dan aparat. Dengan senjata dan sumber-sumber tersebut pemerintah dapat memfungsikan untuk menumbangkan segala jenis penentang kekuasaan termasuk pendidikan yang bisa juga dijadikan sebagai alat pelanggeng kekuasaan.¹⁷

Relasi Pendidikan Islam Dan Politik Kekuasaan

Sirozi menegaskan bahawa hubungan antara politik kekuasaan dan pendidikan terwujud kedalam bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dalam suatu masyarakat, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan nyata, dan dalam masyarakat yang lainnya hubungan tersebut bisa saja melemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara pendidikan dan politik kekuasaan di negara-negara berkembang berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya sesuai dengan pola yang dibentuk oleh kekuasaan yang ada.¹⁸

Politik kekuasaan memiliki keterkaitan yang terlihat jelas didalam dunia pendidikan islam,. Sejarah peradaban Islam, banyak ditandai oleh kesungguhan para umara dan ulama dalam memperhatikan persoalan pendidikan, dalam upaya memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pendidikan islam banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan. Mengapa demikian, karena tujuan pemerintahan islam adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dan hal tersebut tidak akan mampu ditegakkan tanpa melaksanakan syariat. Sedang syariat tidak dapat ditegakkan tanpa umat yang paham tentang syariat.¹⁹

Jika kekuasaan diartikan dengan pemerintah yang berdaulat maka setidaknya relasi yang terbangun didalamnya adalah pendidikan islam merupakan kebutuhan negara. Oleh karena itu, kekuasaan dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan islam berdasarkan tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat sepenggal kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang memberikan isyarat bahwa

¹⁷ Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan analisis dinamika formulasi dan implementasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 45-46.

¹⁸ M. Sirozi, *Politik pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15-16.

¹⁹ M. Sirozi, *Politik pendidikan*, ... hlm. 3.

jika ingin meraih kemerdekaan yang sesungguhnya maka negara harus mencerdaskan bangsanya.²⁰

Jika dicermati lebih lanjut, pemerintah telah memberikan kebijakannya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bab XIII tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.²¹

Pemaparan Undang-Undang dasar di atas, pemakalah menilai bahwa pemerintah telah memberikan kepedulian yang sangat besar terkait pendidikan Islam. Bahkan jika melihat lebih teliti, pemerintah cenderung menggunakan nilai-nilai keislaman dalam menetapkan undang-undang. Hal tersebut terlihat jelas pada ayat tiga “meningkatkan keimanan dan ketakwaan” dan ayat kelima “menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa” yang dalam agama Islam semua nilai tersebut menjadi pokok ajaran. Akan tetapi, dalam implementasi undang-undang tersebut (kebijakan pendidikan) perlu diadakan pengawasan secara bersama agar tidak ada penyalahgunaan peraturan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sebuah kebijakan harus berjalan secara ideal melalui tahapan yang berlaku. Berawal dari isu dan agenda pemerintah kemudian diformulasikan menjadi sebuah kebijakan pendidikan dan diimplementasikan. Setelah itu, hal yang terpenting dari proses implementasi adalah adanya evaluasi kebijakan. Karena dengan adanya evaluasi kebijakan akan terlihat apakah suatu kebijakan dianggap relevan dan mensejahterakan atau malah mempersulit dan menyengsarakan masyarakatnya.²² H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa setidaknya ada empat permasalahan yang berkenaan erat dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan. Empat permasalahannya, sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Rifai, *politik pendidikan nasional*, (Yogyakarta, Ar-ruzz Media, 2011)

²¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016), hlm. 105-106.

²² H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 434

Domestifikasi dan Stupidifikasi

Proses pendidikan yang terjadi dalam sekolah terindikasi adanya masalah domestifikasi (penjinakan). Istilah tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, sebab proses pendidikan berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan untuk tujuan menjinakan pribadi-pribadi liar agar tunduk dan patuh kepada tuannya. Mengapa demikian?, sebab peraturan yang mengikat sebuah proses pendidikan tanpa adanya keleluasan untuk melaksanakan peraturan tersebut, guru dan murid tidak berbeda dengan mesin-mesin robot yang diprogram sedemikian rupa untuk mengikuti penciptanya, sehingga dapat membunuh kreatifitas dan akan timbul masalah lain yaitu stupidifikasi (pembodohan).²³

Dengan proses belajar yang demikian, peserta didik menjadi subjek eksploitasi oleh suatu kekuasaan di luar pendidikan dan menjadikan peserta didik sebagai budak dan alat dari penjajahan mental dari yang mempunyai kekuasaan. Stupidifikasi ini terlihat dalam proses pendidikan pada masa kolonial dengan tujuan menciptakan buruh yang murah untuk mengeksploitasi daerah jajahan. Begitu juga keadaan pendidikan saat ini, yang membedakan hanya pelaku penjajah merupakan dari bangsanya sendiri.

Pendidikan domestifikasi dapat dijumpai pada pandangan dogmatis dan mendewakan ijazah. Di negara-negara berkembang, ijazah menjadi suatu penyakit, yang jika tanpa ijazah semua permasalahan tidak akan terselesaikan. Kualitas dari seseorang ditentukan dan diukur berdasarkan ijazah. Tidak peduli ijazah tersebut didapat dari proses yang jujur atau membeli melalui instansi yang tidak bertanggung jawab. Proses pendidikan tersebut, juga mulai merambah dalam lembaga-lembaga Islam, dimana saat ini mulai ikut-ikutan mensejajarkan diri dan meninggalkan idiologinya.

Indoktrinasi

Proses pendidikan mengenal kekuasaan dalam pengertian yang berorientasi pada advokasi, sedangkan kekuasaan yang lain berorientasi pada legitimatif. Adanya indoktrinasi biasanya melalui perantara yang tidak terduga, begitu juga dalam pendidikan, contoh nyata indoktrinasi yang ada saat ini seperti adanya kurikulum yang mengikat. Penyusunan kurikulum persekolahan di Indonesia yang silih berganti menunjukkan betapa kekuasaan yang berlaku menancapkan bukannya dalam penentu isi kurikulum sesuai dengan sistem pemerintahan. Kurikulum pada semua tingkat pendidikan merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah agar menghilangkan kebebasan dari tiap-tiap lembaga pendidikan dalam

²³ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm. 146.

menyusun kurikulumnya sendiri. Semua aspek kurikulum sudah diatur sesuai dengan proses domestifikasi yang dijelaskan sebelumnya. Maka yang terjadi adalah proses mentransmisikan ilmu secara paksa.²⁴

Senada dengan proses domestifikasi, dalam pendidikan islam proses indoktrinasi terutama dalam kurikulum sudah mulai menguasainya. Akan tetapi, proses indoktrinasi kurikulum tidak terlalu mengikat bagi sekolah-sekolah yang bersifat swasta atau bukan dibawah naungan Menteri Pendidikan Nasional. Sebab di sekolah-sekolah swasta masih diberi keluasaan untuk menerapkan cirinya, ke hasanya dan bahkan ideologinya.

Demokrasi Pendidikan

Berbicara demokrasi pendidikan berarti berbicara tentang kebebasan dalam pendidikan. Kata “bebas” yang dimaksud adalah kebebasan yang disertai kesempatan-kesempatan untuk memilih. Di Indonesia demokrasi pendidikan sudah berjalan akan tetapi belum seutuhnya. Terlihat jelas pada perubahan amandemen tentang pendidikan dan kebudayaan. Dimana pemerintah memberikan 20% dari anggaran negara untuk kepentingan pendidikan. Namun seperti yang pemakalah sampaikan sebelumnya, bahwa implementasi demokrasi pendidikan belum seutuhnya bahwa dari anggaran yang begitu besar apakah benar-benar telah sampai pada sektor yang dianggarkan atau malah sebaliknya. Melihat kenyataan yang demikian, apakah pendidikan Islam juga memperoleh hak yang sama atau hanya pendidikan yang bersifat umum dalam hal ini adalah sekolah berbasis negeri.

Integrasi Sosial

Banyak asumsi yang menyatakan bahwa integrasi sosial terlahir melalui tangan kekuasaan, padahal tidak selalu demikian. Adakalanya integrasi sosial terlahir melalui pendidikan yang baik. Bahkan H.A.R Tilaar menegaskan bahwa integrasi sosial tidak dapat dipaksakan melalui kekuasaan. Karena dengan memaksakan integrasi sosial yang diciptakan oleh kekuasaan akan membunuh budaya-budaya lokal, sehingga kehidupan yang plural akan hilang.²⁵

Politik dalam Reformasi Pendidikan Islam Di Indonesia

Reformasi adalah suatu perubahan, perbaikan dan pembaruan. Oleh karena itu, politik dalam reformasi pendidikan dapat dimaknai sebagai pembaruan dalam dunia pendidikan yang

²⁴ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*,... hlm. 146

²⁵ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*,... hlm. 154

dilatar belakang oleh faktor politik kekuasaan.²⁶ Mochtar Buchori menyatakan dalam pandangannya bahwa generasi politik yang mengatur kehidupan bangsa selama periode orde baru tumbuh pada waktu kondisi pendidikan kita sudah mulai menurun. Ekspansi system pendidikan yang berlangsung sangat cepat pada waktu itu, tanpa diketahui dan dikehendaki, telah merosotkan mutu sekolah-sekolah. Kemerossotan ini terjadi, karena elit pendidikan yang sangat kecil yang dimiliki saat itu, harus direntang panjang-panjang untuk memungkinkan ekspansi system yang cepat tersebut.²⁷

Pada masa Orde Baru birokrasi sebagai sarana efektif untuk melakukan intervensi kepada semua aspek kehidupan bernegara. Eksistensi penguasa merupakan kekhawatiran utama bagi pemerintah, sehingga intervensi yang dilakukan oleh penguasa terhadap semua aspek kehidupan bernegara sebagai instrumen penting untuk mendorong kelestarian dan kelangsungan penguasa. Akibat dari system sentralis ini membuat sikap apatis dikalangan cendekiawan dan semua lapisan masyarakat untuk berfikir secara demokratis, kritis, dan kreatif.

Sistem pemerintahan Orde Baru ini, menghalangi munculnya gerakan oposisi sebagai social control terhadap pemerintahan atau penguasa. Oposisi dalam suatu Negara yang demokratis menjadi suatu keharusan politik yang harus di tempatkan pada posisi yang penting. Di Indonesia ini di gerakan oposisi di pandang oleh penguasa sebagai pendobrak terhadap eksistensi penguasa, sehingga munculnya oposisi selalu tidak sepi oleh kecurigaan penguasa, didukung oleh otoritarian.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya kasus yang sama terjadi dimana masih terdapatnya pemimpin kita baik dalam skala nasional maupun daerah menjadikan pendidikan Islam sebagai lahan politik, sehingga “tema-tema” pendidikan kadang kadang menjadi slogan politis dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, entah dalam kasus masih dalam pemerintahannya maupun ketika menjelang Pilkada. Parahnya, partai-partai yang tidak bertanggung jawab berani masuk dalam tatanan persekolahan. Membidik siswa dan siswi yang baru pertamakali mengenal dunia pilkada dengan iming-iming bantuan alat-alat yang berkaitan dengan kesuksesan dalam sekolah. Sering dilupakan oleh kalangan pendidik bahwa salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Dalam aspek ini di jelaskan hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan, hubungan antar Negara, hubungan antar organisasi, dan sebagainya.

²⁶ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*,...hlm. 660.

²⁷ Mochtar Buchori, *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.19

Kemunculan madrasah di Indonesia merupakan konsekuensi dari proses modernisasi surau yang cenderung disebabkan oleh terjadinya tarik menarik antara sistem pendidikan tradisional dengan modern. Namun, disadari oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peran ulama telah melahirkan sistem budaya kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik, disamping spiritual. Hal ini terbukti banyaknya para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri.²⁸ Selain itu, pendidikan Islam di Indonesia sangat beragam, memiliki ciri khasnya masing-masing sesuai dengan lembaga yang mendirikan.

Konsekuensi dari keragaman orientasi pendidikan adalah munculnya para tokoh formal dan informal yang memiliki pemikiran dan pergerakan politik yang berbeda, ada yang berfikir lebih modernis, fundamentalis, tradisional dan nasionalis. Meski perilaku politik seorang tokoh semata-mata tidak hanya ditentukan oleh institusi pendidikan tertentu dan masih ada faktor lain (lingkungan, sosiokultural, potensi berfikir, dan sebagainya), pengaruh suatu institusi pendidikan cukup berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang untuk mempunyai paradigma berfikir yang berbeda.²⁹

PENUTUP

Politik kekuasaan merupakan cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Ketika menjalankan kekuasaannya, pemerintah memerlukan unsur-unsur yang berguna untuk menopang kekuasaan, salah satunya dengan masyarakat yang cerdas dan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sedangkan memperoleh masyarakat yang cerdas dan mampu menjalankan roda pemerintahan tidak ada cara lain selain dengan mendidik masyarakatnya. Namun, dalam kenyataannya, proses pendidikan malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melanggengkan kekuasaannya.

Cara yang dilakukan dengan membuat sistem atau kebijakan yang jika ditinjau lebih jauh berisi kebijakan yang membela dan membenarkan kekuasaannya. Sedangkan pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berada dalam kekuasaan tersebut. Meskipun munculnya pendidikan Islam sebenarnya tidak berasal dari kekuasaan, melainkan dari ajaran agama yang kemudian dinilai baik sehingga diterapkan dan menjadi falsafah kenegaraan. Tetap saja pendidikan Islam berada dalam cengkraman kekuasaan. Seperti dalam mendirikan sebuah lembaga pesantren atau institusi diharuskan meminta izin kepada kekuasaan.

²⁸ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelejensia Dan Perilaku Politik Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 192.

²⁹ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan risalah, 1983), hlm. 6-7

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanis Teoritis*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005.
- Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* . Yogyakarta: Gading Publishing. 2012.
- Buchori, Mochtar. *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*.Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- Dawam, Ainur Rofiq dan Ahmad Ta'arifin. *Manajemen Madrasah Bebas Pesantren*.
- Dewantara, Kihajar. Bagian I: *Pendidikan cetakan kedua*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. 1977.
- Dinas Pendidikan. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* . Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2005.
- Djumhur dan Danasuparta. *Sejarah Pendidikan* . Bandung: CV Ilmu. 1959.
- Fathoni, Muhammad Kholid. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional[/paradigma Baru*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2005.
- Hoetomo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar. 2005.
- Jakarta Utara: Listafariska. 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat JendralMPR RI. 2016.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Negara, Ahmad Mansyur Surya. *Api Sejarah*. Bandung: CV Tria Pratama. 2016.
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan risalah. 1983.
- Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* . Surabaya:Arkola. 1994.
- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual Intelejensia Dan Perilaku Politik Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan. 1993.
- Rifai, Muhammad. *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2011.
- Rohman, Arif. *Kebijakan Pendidikan analisis dinamika formulasi danimplementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012.
- Salahudin, Anas. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005